



Analisis Peran BAPPEDA Pada Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Labuhan Batu

Muhammad Reza Mahendra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Korespondensi penulis: rezamah1020@gmail.com

Hendra Harmain

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: hendra.harmain@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Abstract. *The research was conducted to find out the role of BAPPEDA in planning Regional Original Income (PAD) in Medan City. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques, namely interviews and documentation. The results of this research explain that the source of Medan City's Original Regional Income comes from land and building taxes. Apart from that, there are supporting and inhibiting factors in planning the Regional Original Income of Medan City. The role of the Development Planning Agency in planning the Regional Original Income of the City of Medan is to provide recommendations for reports that must be accurate and up-to-date as well as good work programs in order to create the vision and mission that the City of Medan hopes for.*

Keywords: BAPPEDA, Regional Original Income, Medan City

Abstrak. Penelitian dilakukan untuk mencari tahu bagaimana peran BAPPEDA dalam merencanakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Kota Medan berasal dari pajak bumi dan bangunan. Selain itu, ada faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Peran Badan Perencanaan Pembangunan dalam perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan adalah memberikan rekomendasi laporan yang harus akurat dan up-to-date serta program kerja yang baik dalam rangka menciptakan visi dan misi Yang Diharapkan Kota Medan.

Kata kunci: BAPPEDA, Pendapatan Asli Daerah, Kota Medan

LATAR BELAKANG

Fauzi dan Iskandar [1984] berpendapat bahwa pengertian PAD adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah yang diperoleh dari sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PerDa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk keperluan daerah. Maka dari itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut dengan sebaik mungkin. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan dengan cara dipungut yang diperoleh oleh daerah sesuai peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan terhadap pendapatan daerah salah satunya adalah dengan cara meningkatkan efektivitas dan kontribusi beberapa sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil BUMD, penerimaan instansi pemerintah, serta penerimaan lainnya. Hasil dari pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti membangun jalan, rumah sakit pemerintah daerah, jembatan, membuka lapangan kerja baru, dan sebagainya.

Terdapat beberapa peran dalam pelaksanaan perencanaan Pendapatan Asli Daerah serta perangkat terpenting salah satunya adalah Pemerintah Daerah. Selain itu, pihak swasta juga turut berperan dalam pelaksanaan perencanaan Pendapatan Asli Daerah. Adanya sikap tanggung jawab dan konsisten dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja yang telah ditentukan merupakan hal terpenting dalam mewujudkan perencanaan pendapatan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran penduduk, sehingga keberhasilan atau kegagalan pembangunan nasional dapat tercermin dalam pembangunan daerah. Hal ini tertuang dalam, yang berbunyi 'mempromosikan kesejahteraan umum'. Karena pembangunan daerah merupakan cerminan pembangunan nasional, maka diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama masyarakat dapat mengelola potensi daerahnya untuk meningkatkan taraf perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan daerah adalah dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah.

BAPPEDA Kota Medan termasuk perangkat daerah terpenting yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan perencanaan Pendapatan Asli Daerah. BAPPEDA Kota Medan dalam melaksanakan perencanaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat perannya pada penelitian ini. Oleh karena itu, agar dapat memaksimalkan peranannya, BAPPEDA Kota Medan merencanakan pendapatan tersebut sebagaimana fungsi serta tugas yang telah ditentukan. Namun, dalam menjalankan peranan tersebut BAPPEDA Kota Medan mendapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah ketidakefektifan peran BAPPEDA Kota Medan dalam perencanaan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pada tiap tahunnya data pada Pendapatan Asli Daerah tidak diperbaharui sehingga terjadi perbedaan data dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dari efektif atau tidaknya peran BAPPEDA Kota Medan.

Agar pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Pemda dalam melaksanakan pembangunan daerah. Adapun pendapatan daerah yang disebut yakni terdiri dari pajak, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berdasarkan Pajak Daerah, dijelaskan bahwa jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerahi kota Medan adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak perolehan bumi dan bangunan dan hak adat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pada penelitian Analisis Peran BAPPEDA Pada Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Ditemukan adanya beberapa kelebihan dan kekurangan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang muncul. Maka dari itu, digunakan suatu metodologi yang dapat mendeskripsikan dengan jelas fenomena serta bagaimana pengetahuan tentang feromena tersebut didapat. Alasan metode kualitatif digunakan pada penelitian ini karena menurut Mochtar Mas' oed [1990] yaitu masalah yang berkaitan dengan manusia pada dasarnya bergantung pada hasil observasi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana Peran Bappeda dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap Kassubag Bappeda Kota Medan di kantor Bappeda dalam upaya dan peran Bappeda terhadap perencanaan pendapatan asli daerah kota Medan. Analisis data dilakukan secara simultan melalui analisis berkelanjutan dengan teknik analisis data untuk penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum salah satu sumber pendapatan daerah Pemerintahan Kota Medan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni penghasilan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 1. Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (PPD)	Pendapatan Retribusi Daerah (PRD)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PHPKDD)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (PADS)
2016	1.316.127.547	184.415.400	10.312.869	316.341.012
2017	1.380.127.548	257.773.650	12.181.227	323.697.914
2018	1.511.000.000	250.841.500	12.300.000	338.521.559
2019	1.727.098.261	256.191.500	13.144.465	341.847.941
2020	1.277.644.550	72.611.439	18.229.074	346.267.035
2021	1.727.934.905	110.447.171	20.673.097	300.420.399
Rata-rata	1.483.332.135,17	188.713.443,33	14.473.455,33	327.849.476,67

Sumber: BPS

Dari Tabel 1 diatas didapatkan hasil rata-rata anggaran PAD di Kota Medan yang terdiri dari: a). Pendapatan Pajak Daerah (PPD), b) Pendapatan Retribusi Daerah (PRD), c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PHPKDD), dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (PADS). Pada tahun 2016-2021 rata-rata anggaran PAD terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah berkisar Rp 1.483.332.135,17. Sisanya berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah Rp 188.713.443,33, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 14.473.455,33, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 327.849.476,67.

Peran BAPPEDA Pada Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Dalam pelaksanaan perencanaan pendapatan asli daerah, terdapat peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Tanggung jawab bersama dan konsistensi dalam menjalankan program latihan yang telah ditetapkan merupakan kunci utama dalam mencapai pengaturan pendapatan terdekat yang dapat dikelola dan layak.

Bappeda kota Medan menjadi salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan penataan kapasitas dalam hal perencanaan pendapatan asli daerah. Peran wujud bappeda dalam melaksanakan pendapatan asli daerah dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat beberapa aspek. Maka dari itu, agar memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas serta fungsi yang telah ditentukan.

Menurut Kassubag Bappeda Bapak Taufik Teguh Pribadi, diketahui bahwa salah satu tolak ukur peran Bappeda dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, di mana dalam pelaksanaan latihan yang berbeda yang memengaruhi definisi persiapan yang merupakan faktor kritis dan awal pencapaian dalam mencapai tujuan perencanaan pendapatan asli daerah dalam berbagai bidang.

Diketahui pula, bahwa salah satu peran BAPPEDA Koa Medan dalam merencanakan Pendapatan Asli Daerah dapat diamati dari fungsi dan tugas BAPPEDA Kota Medan. Pelaksanaan yang berbeda dapat mempengaruhi hasil pencapaian dalam merencanakan Pendapatan Asli Daerah di berbagai bidang maupun sub bidang yang ada di BAPPEDA Kota Medan.

Eksistensi dari BAPPEDA Kota Medan dalam mencapai hasil perencanaan yang baik tepat dilihat dari program kerja yang telah ditetapkan sebagai bagian dari seluruh upaya dalam merencanakan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan usaha serta memaksimalkan program kerja yang direncanakan pada tiap tahunnya melalui perencanaan program kerja pada Pemerintah Daerah Kota Medan sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RABD).

Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung Bappeda dalam upaya perencanaan pendapatan asli daerah kota Medan yakni terjalinnya silaturahmi yang baik dan hubungan yang saling menguntungkan kepada masyarakat Kota Medan. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang wajib pajak kepada masyarakat atau yang disebut dengan pemulihan. Dengan adanya upaya untuk melakukan sosialisasi tersebut diharapkan mampu menimbulkan kesadaran pada masyarakat untuk membayar iuran wajib mereka yaitu pajak. Biasanya BAPPEDA Kota Medan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendapatan Kota Medan sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi untuk dapat menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang pajak serta menjelaskan bagaimana prosedur pembayaran pajak tersebut kepada masyarakat khususnya di Kota Medan. Kemudian, pada saat melakukan sosialisasi haruslah mengikutsertakan pemberian informasi tentang peraturan UU mengenai wajib pajak sehingga masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut lebih mengetahui kewajiban mereka lebih lengkap.

Menurut Kassubag Bappeda Bapak Taufik Teguh Pribadi, ketersediaan data yang bagus dan terkini juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pendapatan asli daerah kota Medan terutama pajak bumi dan bangunan yang merupakan salah satu sumber terbesar dalam pendapatan asli daerah kota Medan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam perencanaan PAD kota Medan salah satunya adalah rincian data baik dari bangunan maupun anggaran tiap tahunnya tidak diperbaharui (*update*) setiap tahun sehingga adanya perbedaan hasil data, padahal semakin lama semakin meningkat jumlah bangunan seperti restoran, hotel dan tempat hiburan di Kota Medan. Seharusnya data dari tiap pajak harus selalu diperbaharui (*update*) untuk mewujudkan perencanaan PAD Kota Medan yang efektif.

Perlunya ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak karena apabila pajak dibayarkan tepat pada waktunya akan menguntungkan masyarakat juga.. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi pemahaman dengan dilakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak itu bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja tetapi semua pihak ikut merasakan kegunaan membayar pajak tersebut.

Menurut Kassubag Bappeda Kota Medan, Bapak Taufik Teguh Pribadi, peran Bappeda pada PAD Kota Medan yakni menganalisa laporan dan program kerja seperti laporan anggaran dan laporan pendapatan yang disusun dan dianggarkan di kota Medan untuki mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Peran Bappeda kota Medan hanya memberikan rekomendasi terhadap laporan dan program kerja yang lebih transparan, akurat, dan terkini (*update*). Karena pada umumnya PAD merupakan tugas pokok dari Dinas Pendapatan kota Medan.

KESIMPULAN

Dari informasi penelitian tentang Peran BAPPEDA dalam merencanakan Pendapatan Asli Kota Medan ini, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan. Akan tetapi masih belum dapat dikatakan seimbang dan terjamin dalam menangani keuangan daerah. Selain itu, PAD sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak restoran, pendapatan pajak hotel, pendapatan pajak tempat hiburan, dan lain-lain. Diketahui pula, sumber paling besar PAD Kota Medan berasal dari pembangunan yang ada di Kota Medan.

Terdapat faktor pendukung dalam peran Bappeda dalam perencanaan PAD kota Medan yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayar pajak. Tidak hanya terdapat kelebihan tetapi juga terdapat kekurangan peran tersebut yaitu kesadaran sebagai masyarakat Kota Medan masih kurang untuk memahami pentingnya membayar pajak dan harus dapat ditingkatkan lagi. Selain itu, data-data pajak yang tidak diperbaharui (*update*) disebabkan di tiap waktunya banyak restoran dan hotel yang baru dibuka. Adapun faktor penghambatnya adalah data-data pajak yang kurang terkini dikarenakan setiap waktu banyaknya restoran dan hotel baru yang buka. Peran Bappeda terhadap perencanaan PAD kota Medan dengan memberikan

rekomendasi terhadap laporan yang harus akurat dan terkini serta program kerja yang baik agar terciptanya visi dan misi Kota Medan yang sempurna.

DAFTAR REFERENSI

- Cruz, A. L. M., Cruz, F. J. M., & Antonio, O. C. C. 2018. *Assessing the Revenue Raising Capacity of the Local Government of Bangabon in the Philippines*. *Journal of Public Administration and Governance* 8 (3) : 99.
- Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*
- Hanum, Z. 2011. *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai*. *Jurnal Ilmiah & Bisnis* ISSN 1693 - 7619 Vol. 10 No. 2.
- Hannum, Masrida, Yoyon Safrianto. 2021. *Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. *Jurnal Pendidikan Tambusai* ISSN 2614-3097 Vol. 5 (3) : 5984 - 5988.
- J. Ravianto. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Jati, A Waluya. 2006. *Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur (Studi Pada Setiap Daerah Tingkat II di Jawa Timur)*. *Humanity* ISSN 0216 - 8995 Vol. 2 No. 1 s.
- Julius, S. 2011. *The Effect of Budgets and Work plans on the performance of Local Governments: A case study of Mukono District Local Government*.
- Karim, H., Maina, K. E., & Kinyua, J. M. 2017. *Effect of Tecnology and Information Systems on Revenue Collection by the County Government of Embu, Kenya*. *International Academic Journal of Information Systems and Technology* 2 (1).
- Khusaini, M. 2014. *Local Government Planning And Budgeting Process: A Case Of Districts And Cities In Indonesia*. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*. Vol. 7, No. 2.
- Lestari, Andi Ayu Puji. 2017. *Peranan Sektor Basis Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun*. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* Vol. 6.
- Mas'oe'd, Mohtar C. M. 2011. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mohamed, A. A. 2017. *Challlanges of Mogadishu Local Goverment Revenue dalam Proceedings of the 2017 2nd International Conference*. *Humanities and Social Sciense* Vol. 83 : 529-533, Paris, France: Atlantis Press.
- Nugraha, P. L. 2018. *Analysis of Efficiency, Effectiveness, and Contribution of Parking Tax Revenue and Parking Retribution on City's Original Revenue*.
- Suhadak, Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.